

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MENJUAL BARANG KENA CUKAI YANG TIDAK DILEKATI PITA CUKAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)

Daniel Simorangkir

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia adalah tindak pidana peredaran barang ilegal. Persaingan yang ketat antar pelaku usaha menimbulkan kecenderungan bagi mereka untuk menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan besar dengan cara melanggar prosedur yang berlaku guna menghindari pajak atau cukai. Padahal kejahatan ini dapat sangat merugikan negara.

Permasalahan dalam penelitian tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai serta pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN.Mdn.

Penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan studi pustaka serta analisis data menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif-analitis.

Kesimpulan dalam penelitian tesis ini yaitu bahwa pengaturan hukum tentang tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana penjara serta pidana denda. Pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN.Mdn adalah menjatuhkan terdakwa pidana penjara 4 (empat) tahun 10 (bulan) dan pidana denda sebanyak Rp.149.207.800, penulis menilai putusan tersebut tidak tepat seharusnya majelis hakim melakukan pertimbangan non yuridis lainnya yaitu peran atau kedudukan terdakwa, Apakah terdakwa bertindak sebagai pelaku utama atau hanya pembantu. Peran dan kedudukan terdakwa, dalam tindak pidana ini tentu akan menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, khususnya dalam menentukan berat ringannya tindak pidana yang didakwakan.

Kata Kunci : Penerapan Sanksi, Tindak Pidana, Cukai, Pita Cukai.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACT OF SELLING EXCISABLE GOODS WITHOUT EXCISE TAPE ATTACHED FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 39 OF 2007 CONCERNING EXCISE (Study of Medan District Court Decision Number 403/Pid.Sus/2023/PN.Mdn)

Daniel Simorangkir

One of the crimes that is rampant in Indonesia is the crime of distributing illegal goods. Tight competition between business actors creates a tendency for them to justify any means to gain large profits by violating applicable procedures to avoid taxes or excise. In fact, this crime can be very detrimental to the country.

The problem in this thesis research is how the legal regulations regarding the crime of selling excise goods that are not affixed with excise stamps, the application of criminal sanctions against perpetrators of the crime of selling excise goods that are not affixed with excise stamps and the considerations of the panel of judges in imposing criminal sanctions against perpetrators of the crime of selling excise goods that are not affixed with excise stamps Decision Number 403 / Pid.Sus / 2023 / PN.Mdn.

The research uses descriptive analytical research, the type of research used in this research is normative juridical using library research and data analysis using qualitative methods which produce descriptive-analytical data.

The conclusion in this thesis research is that the legal provisions regarding the crime of selling excise goods without excise stamps are regulated in Article 54 and Article 56 of Law Number 39 of 2007 concerning Amendments to Law Number 11 of 1995 concerning Excise. The application of criminal sanctions against perpetrators of the crime of selling excise goods without excise stamps is administrative sanctions and criminal sanctions in the form of imprisonment and a fine. The consideration of the panel of judges in Decision Number 403 / Pid.Sus / 2023 / PN.Mdn was to sentence the defendant to 4 (four) years and 10 (months) in prison and a fine of Rp. 149,207,800, the author considers the decision inappropriate, the panel of judges should have made other non-judicial considerations, namely the role or position of the defendant, whether the defendant acted as the main perpetrator or just an assistant. The role and position of the defendant, in this crime will certainly be a consideration for the judge in making a decision, especially in determining the severity of the crime charged.

Keywords : Implementation of Sanctions, Criminal Acts, Excise, Excise Stamps.